



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

e

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada RKPD.
- (3) Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025;

e

- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

!

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2024

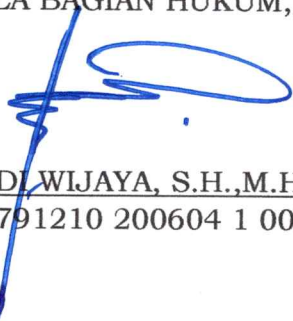
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah diselaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara ringkas penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Blitar terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Persiapan; meliputi proses
 - (1) Pembentukan SK tim penyusun renja
 - (2) Orientasi tim kerja
 - (3) Penyusunan agenda tim kerja
 - (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar.
2. Tahapan Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025; meliputi proses :
 - a. Penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Blitar 2025 dan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kota Blitar 2021- 2026
 - b. Evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
 - c. Pemecahan masalah yang sedang dihadapi
 - d. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
3. Pelaksanaan Forum OPD.

Dilakukan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk :

 - a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c) Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan

- d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan surat edaran Walikota Blitar tentang rancangan awal RKPD.

4. Penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025

Proses penetapan Renja Dinas Sosial Kota Blitar dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar adalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap Renja Dinas Sosial Kota Blitar oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Sosial Kota Blitar sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Blitar kepada Walikota Blitar melalui Bappeda Kota Blitar untuk mendapatkan pengesahan, dan selanjutnya Renja Perangkat Daerah ini digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS dan RAPBD tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Blitar ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 23. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
 26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar nomor 27 tahun 2024);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025 sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra tahun 2012-2026, yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah

1. Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.
2. Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Blitar
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan capaiannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
	Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	85,08	85,13	84,39	84,96	100,68	85.00	85.00	99,91
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	85,08	84,35	84,39	84,96	100,68	85.00	85.00	99,91
106.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,6	82,70	82,40	83,10	100,85	84,03	84,03	99,33
106.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	31	6	6	6	100	7	19	61,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah	Daerah									
106.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	48	11	12	12	100	12	35	72,92
106.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	26	27	25	25	100	26	26	100
106.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	75,00
106.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	Beda Indikator	4	4	100	2	6	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Kelengkapannya										
106.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	Beda Indikator	25	25	100	26	26	100
106.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	100.00	100	100.00	100	100	100	100
106.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Beda Indikator	1	1	100	1	2	50,00
106.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	Beda Indikator	3	3	100	3	6	50,00
106.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	20	Beda Indikator	5	5	100	5	10	50,00
106.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	Beda Indikator	12	12	100	10	22	55,00
106.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Beda Indikator	2	2	100	1	3	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	12	12	12	100	12	36	75,00
106.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	61	40	45	112,50	40	146	91,25
106.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	Beda Indikator	4	4	100	1	5	62,50
106.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
106.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	48	48	48	100	48	144	75,00
106.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	Beda Indikator	13	13	100	13	26	50,00
106.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	15	15	15	100	15	15	88,24
106.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	Sub Keg baru	1	1	100	-	1	8,33
106.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	160	Beda Indikator	50	50	100	40	90	56,25
106.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100	1	1	100,00
	Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indikator 1 : Indeks keparahan kemiskinan	Indeks	0,21	0,19	0,24	0,12	150	0,23	0,23	100
		Indikator 2 : Persentase PMKS	%	7,04	7,40	7,41	7,25	102,16	7,26	7,26	100
		Indikator 3: Persentase PPKS	%	7,04	7,40	7,41	7,25	102,16	7,26	7,26	100
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan PPKS	Indikator 1 : Persentase fakir miskin yang berdaya		3,24 (formulasi baru)	0,66	-	1,86	-	2,32	2,32	71,60
		Indikator 2 : Persentase penurunan PMKS		5,89	3,85	1,47	1,46	99,32	1,49	6,66	113,11
		Indikator 3 : Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial		94,11 (indikator baru)	88,93	-	89,90		91,19	91,19	96,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.02.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	5	Beda Indikator	8	8	100	6	6	120
106.04.00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Peningkatan PMKS yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	19,69	16,17	0,89	1,08	121,35	0,89	18,14	92,13
106.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	145	125	125	125	100	130	130	89,66

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	11	10	10	100	10	31	36,47
106.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	540	Beda Indikator	152	156	102,63	325	481	89,07
106.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	256	Beda Indikator	25	25	100	25	50	19,53
106.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	515	Beda Indikator	324	324	100	360	684	132,82
106.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	Beda Indikator	100	100	100	70	96,72	147,83
106.05.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Persentase Peningkatan PMKS terlatih	%	160	50	24,20	27,22	112,48	19,5	134,58	84,11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	JAMINAN SOSIAL										
.		Persentase penurunan Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	6,81	1,82	1,38	11,37	823,91	1,40	12,98	190,60
106.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Persentase PMKS terlatih	%	100	30	20	24,50	122,50	20	74,5	74,5
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	400	Beda Indikator	100	337	337	100	437	109,25
106.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10.264	10.814	9.584	9.584	100	9.584	9.584	106,63
106.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	120	113	113	100	105	338	84,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.06.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	13	20	20	100	40	73	60,83
106.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	50	80	80	100	60	190	67,86
106.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	%	100	88,00	84	81,48	97	90	90	90,00
106.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27	25	27	27	100	27	27	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Th 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2023			Target Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Th 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2024	
						Target Renja PD Th 2023	Realisasi Renja PD Th 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Th 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
106.07.00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
106.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	980	Beda Indikator	975	975	100	975	975	99,49

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Urusan Sosial yang melaksanakan sebanyak 6 program, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat target 82,40 realisasi 83,10, capaian kinerja 100,85%. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indeks kepuasan penerima layanan terhadap layanan publik di bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial atas 9 unsur yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, tarif/biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara digital melalui SUKMA-E (Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik) Jatim melibatkan responden sebanyak 267 orang dengan hasil IKM 83,10 (katagori BAIK).
2. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100,00%. Kinerja ini diperoleh melalui monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yaitu TKSK dan PSM dalam layanan kesejahteraan sosial dan berdasarkan hasil monev sebanyak 44 PSM dan 3 TKSK secara keseluruhan dikategorikan aktif dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, target 0,89%, realisasi 1,08%, capaian kinerja 121,35%. Rehabilitasi Sosial merupakan upaya untuk memulihkan fungsi sosial PPKS (diluar fakir miskin, ODHA, korban penyalahgunaan Napza dan korban bencana) agar bisa hidup layak dan bermartabat di masyarakat dengan jenis layanan menyesuaikan dengan kebutuhan PPKS berdasarkan hasil assessment antara lain pemberian permakanaan, penyediaan sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS/PPKS maupun keluarganya, akses layanan kesehatan dan pendidikan, fasilitasi administrasi kependudukan, penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan ke Balai/UPT/LKS rehabilitasi sosial. Capaian kinerja dihitung berdasarkan peningkatan jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial tahun 2022 sebanyak 556 orang, tahun 2023 sebanyak 562 orang, meningkat sebanyak 6 orang (1,08%).
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ada dua indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial target 1,38% realisasi 11,37% dengan capaian kinerja 823,91%. Kinerja ini dihitung berdasarkan penurunan jumlah penerima Rastara dari periode tahun sebelumnya. Tahun 2022 penerima Rastara sebanyak 10.814 KPM turun sebanyak 1.230 KPM menjadi 9.584 KPM pada tahun 2023 atau turun sebesar 11,37%. Penurunan KPM dimaksud karena graduasi mandiri (katagori mampu), meninggal, dobel Bansos Pusat maupun pindah domisili.
 - b. Persentase peningkatan PMKS terlatih target 24,20%, realisasi 27,22%, capaian kinerja 112,48%. Perhitungan kinerja berdasarkan perbandingan jumlah akumulasi peserta pelatihan keterampilan tahun berjalan dengan jumlah akumulasi peserta pelatihan periode tahun sebelumnya yaitu 360 orang di tahun 2022, meningkat sebanyak 98 orang menjadi 458 orang atau naik sebesar 27,22%.

5. Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota target 100%, realisasi 100%, capaian 100%. Kota Blitar bukan merupakan daerah rawan bencana namun Pemerintah Kota Blitar tetap mengalokasikan anggaran yang bersifat penyediaan/penjagaan melalui OPD maupun BTT. Pada Dinas Sosial dialokasikan anggaran untuk penyediaan makan bagi korban bencana alam dan sosial serta kelompok rentan (warga miskin yang sakit) berupa bantuan paket Sembako. Pada tahun 2023 terdapat korban bencana kebakaran dan kekeringan sebanyak 20 orang serta warga miskin yang sakit sebanyak 80 orang dan secara keseluruhan telah menerima bantuan sehingga kinerja tercapai 100,00%.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dengan indikator kinerja persentase TMP dalam kondisi baik, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100,00%. Pemeliharaan TMP Raden Wijaya di Kota Blitar merupakan salah satu fungsi mandatori yang diemban Dinas Sosial dimana pemeliharanya meliputi kebersihan, penyediaan bahan, alat dan sarana kebersihan serta pemeliharaan bangunan serta sarana prasarana di lingkungan TMP. Pemeliharaan kebersihan dilakukan oleh seorang Tenaga Harian Lepas yang diberikan gaji melalui anggaran Dinas Sosial. Sedang pemeliharaan bangunan dan fasilitas serta penyediaan sarana prasarana kebersihan dilaksanakan sesuai kebutuhan berdasarkan identifikasi dan ketersediaan anggaran.

Target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 tercapai sesuai target bahkan ada beberapa yang melebihi target, namun masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan.
3. Belum semua eks peserta pelatihan memanfaatkan bantuan peralatan usaha untuk merintis usaha.
4. Bencana alam dan sosial terjadi sewaktu-waktu sehingga pelaksanaan kegiatan bersifat kasuistis hanya ketika terjadi bencana.

Guna mengatasi permasalahan tersebut maka kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial antara lain :

1. Melaksanakan pembinaan/Bimtek bagi PPKS secara berkelanjutan dengan materi permasalahan PPKS yang menonjol.
2. Bagi PPKS yang dirujuk dan belum mendapatkan tempat di sentra terpadu rehabilitasi sosial Kemensos maupun UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka sambil menunggu ketersediaan tempat yang bersangkutan dititipkan sementara di Lembaga Kesejahteraan Sosial baik di dalam maupun di luar Kota Blitar.
3. Agar pemanfaatan bantuan peralatan usaha lebih maksimal maka dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan/motivasi usaha terhadap masing-masing penerima manfaat.
4. Karena bencana alam terjadinya sewaktu-waktu maka setiap tahun tetap dialokasinya penyediaan anggaran untuk korban bencana yang sifatnya perorangan, sedangkan apabila terjadi bencana dalam skala yang lebih besar maka disediakan anggaran melalui pos Belanja Tidak Terduga melalui BPKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Blitar, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Blitar

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Sosial												
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 368 penyandang disabilitas terlantar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi layanan data dan pengaduan, penyediaan sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan, fasilitasi akses layanan kesehatan, layanan penelusuran keluarga, reunifikasi keluarga dan layanan rujukan

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 65 anak terlantar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial baik kepada anak dan keluarganya, fasilitasi akses layanan pendidikan dan kesehatan, layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 134 Lansia terlantar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi layanan data dan pengaduan, pemberian makanan sehat siap konsumsi, pemberian perbekalan kesehatan, bimbingan

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, fasilitasi akses layanan kesehatan, layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan
4	Persentase gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tahun 2023 sebanyak 34 Gepeng telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment meliputi pemberian makanan saat di shelter PPKS, penyediaan sandang, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, fasilitasi akses layanan kesehatan, penelusuran dan reunifikasi keluarga serta layanan rujukan

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan terhadap korban bencana berdasarkan kejadian bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Tahun 2023 sebanyak 20 korban bencana dan 80 orang kelompok rentan (warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya) telah mendapat bantuan bahan makanan
6	Persentase fakir miskin yang berdaya	IKU	10%	10%	2,32%	2,77%	3,24%	15,7%	45,83%	2,32%	2,77%	3,24%	IKU ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan Bansos peralatan usaha pada tahun sebelumnya yang bekerja/merintis usaha dengan total peserta pelatihan. Peserta pelatihan tahun 2022 sebanyak 120 orang dan berdasarkan hasil monev sebanyak 55 orang telah merintis usaha mandiri, sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 45,83%

No	Indikator	IKU/IKKS PM/	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Namun mulai tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP ada perubahan formulasi perhitungan menjadi perbandingan jumlah akumulasi peserta pelatihan yang bekerja/merintis usaha ditambah akumulasi penerima Bansos yang graduasi mandiri dengan total jumlah fakir miskin pada tahun n
7	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	IKU	1,45 %	1,47%	1,49%	1,52%	1,54%	6,09%	1,46%	1,49	1,52%	1,54%	IKU ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah PPKS tahun sebelumnya dengan PMKS/PPKS tahun berjalan. Jumlah PMKS/PPKS tahun 2022 sebanyak 11.733 dan 11.562 pada tahun 2023 atau turun sebesar 1,46%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Sebaran PPKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2023 masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 11.562, meskipun angka ini sudah menurun 1,46% dari tahun 2022. Angka ini masih didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 10.610. Upaya penanganan fakir miskin melalui pemberian Bantuan Sosial merupakan strategi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Sedangkan upaya pemberdayaan fakir miskin dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian Bansos sarana usaha sehingga selesai pelatihan diharapkan bisa langsung membuka rintisan usaha sebagai sumber tambahan penghasilan. Namun tingkat kemandirian fakir miskin belum sesuai harapan karena upaya pemberdayaan fakir miskin belum dipetakan kebutuhan penanganannya secara spesifik, kecenderungan tergantung pada Bansos yang bersifat konsumtif dan kurang optimalnya sinergi antar OPD dalam penanganan fakir miskin.

Rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Aktivitas, peran serta, kerja sama, soliditas dan semangat PSKS dalam upaya pelayanan dan penanganan masalah PPKS tidak diragukan lagi namun bekal untuk selalu meningkatkan kualitas agar terus bisa beradaptasi dengan setiap perubahan peraturan dan kebijakan kurang didapat dengan maksimal sehingga harus diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas PSKS melalui Bimbingan Teknis/Diklat pelayanan sosial. Disamping peran serta PSKS, kepedulian keluarga, lingkungan/masyarakat sekitar domisili PPKS akan sangat membantu dan meningkatkan efektivitas penanganan PPKS baik berupa pendampingan, bimbingan maupun motivasi agar PPKS bisa menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan bermartabat. Namun elemen masyarakat ini juga perlu mendapatkan sosialisasi dan pengetahuan serta motivasi yang bisa menggugah empati mereka terhadap lingkungan sekitar sehingga bisa terjalin sinergi dengan pemerintah dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PPKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini belum didukung adanya tempat penampungan sementara yang representatif bagi PMKS/PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/kementerian. Pengelolaan shelter PMKS/PPKS kurang optimal karena keterbatasan SDM. Sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya terbatas hanya untuk anak, belum mengakomodir PPKS selain anak. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan peran serta keluarga/masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS terlantar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Walikota Blitar.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial Kota Blitar disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,03 Indeks	4.475.663.921	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00 Indeks	4.863.390.192	Target Kinerja menyesuaikan capaian tb 2 Tahun 2024 sebesar 88,04
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	15.933.700	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	5.933.200	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	3.093.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	3.093.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	12.839.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	2.839.700	Survey IKM melalui e-Sukma dan dianalisis mandiri
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.456.909.700	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	3.706.710.248	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/ bln	3.455.015.3700	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/ bln	3.704.342.748	Antisipasi kenaikan gaji dan tunjangan ASN
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Lap	1.894.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Lap	2.367.500	Menyesuaikan kebutuhan
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian		Persentase pelayanan administrasi	100 %	110.100.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	141.758.432	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
	Perangkat Daerah		kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar			Perangkat Daerah		perangkat daerah yang sesuai standar			
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	30.100.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	46.616.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	80.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	95.142.432	Menyesuaikan kebutuhan
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	245.444.097	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	285.770.234	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.989.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	9.990.700	
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	15.747.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	15.758.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	24.999.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	25.453.100	Menyesuaikan kebutuhan
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	28.025.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	30.713.600	Menyesuaikan kebutuhan
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	24.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	25.241.000	Menyesuaikan kebutuhan
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	5.400.000	
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	127.283.497	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Lap	163.238.534	Menyesuaikan kebutuhan
4.8	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2000 Dok	10.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2000 Dok	9.975.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	51.847.677	
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	8.971.800	
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	42.875.877	Menyesuaikan kebutuhan
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	504.153.524	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	515.772.324	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	87.641.724	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	87.486.324	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	416.511.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Lap	428.286.000	Menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	128.122.900	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	155.598.077	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	77.698.900	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	78.013.077	Menyesuaikan kebutuhan
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	3.500.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	5.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	40 Unit	26.727.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	58 Unit	32.733.000	Menyesuaikan kebutuhan
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.197.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	29.852.000	Menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
II	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	626.441.134	Program Pemberdayaan sosial		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	845.939.600	
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	626.441.134	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	845.939.600	
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembg	626.441.134	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembg	845.939.600	Adanya hibah untuk LKS dan Orsos
III	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan	0,88 %	974.910.216	Program Rehabilitasi sosial		Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,88 %	1.040.515.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
			rehabilitasi sosial								
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	974.910.216	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	1.040.515.900	
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Org	381.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Org	381.500.000	
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Org	11.375.141	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Org	11.372.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	20.037.400	
1.4	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Org	235.763.263	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	482 Org	439.921.700	Penambahan target kinerja
1.5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	50.500.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	42.601.400	Menyesuaikan kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.6	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	3.500.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	3.475.000	
1.7	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	79.500.000	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35.733.000	Menyesuaikan kebutuhan
1.8	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	56.920.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	53.956.400	Menyesuaikan kebutuhan
1.9	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	73 Org	130.851.812	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Org	46.918.100	Penyesuaian target kinerja dengan kebutuhan riil
IV	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,42 %	18.256.665.749	Program Perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,42 %	19.089.977.955	
			Persentase peningkatan PMKS Terlatih	16,3 %				Persentase peningkatan PMKS Terlatih	16,3 %		
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	18.256.665.749	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data DTKS yang diverval	100 %	19.089.977.955	
			Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %				Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %		
			Persentase PMKS Terlatih	20 %				Persentase PMKS Terlatih	20 %		
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Kelurg	103.955.900	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Kelurg	103.955.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
			Kota								
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9514 Kelrg	17.705.478.800	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9572 Kelrg	18.538.791.171	Adanya kenaikan harga beras dan tambahan KPM Rastrada
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orng	447.231.049	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orng	447.230.884	
V	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	216.343.400	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100 %	216.343.400	
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	62.491.600	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	62.491.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	22.499.800	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orng	22.499.800	
1.3	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orng	24.991.800	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orng	39.991.800	Tambahan untuk kegiatan Tagana Masuk Sekolah
2	Kegiatan Penyelenggara n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	94 %	153.851.800	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	94 %	153.851.800	
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orng	153.851.800	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orng	153.851.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	6	6	6	10	11	12
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	34.999.300	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	35.045.000	
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	34.999.300	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase TMP yang terpelihara	100 %	35.045.000	
1.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	975 Makam	34.999.300	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	979 Makam	35.045.000	

Dari tabel diatas terdapat beberapa perbedaan anggaran dan target kinerja sub kegiatan antara Rancangan Awal dan Rancangan Akhir karena menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial yang optimal.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan kegiatan yang berasal aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Dinas Sosial Kota Blitar berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat salah satunya melalui pelaksanaan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran legislatif. Selanjutnya semua usulan ditelaah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial untuk ditetapkan apakah usulan tersebut diakomodir atau tidak. Rekapitulasi hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran Legislatif disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Sosial

NO	USULAN KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	KEC. SUKOREJO					
	NIHIL					
II	KEC. KEPANJENKIDUL					
1.	Pelatihan atau bantuan sosial buat penyandang disabilitas (bisu, buta huruf, perempuan)	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kel. Kauman RT 2/RW 4	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
III	KEC. SANANWETAN					

NO	USULAN KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kel. Gedog	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	Diakomodir
2	Bimtek Karang Taruna	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan se kecamatan Sananwetan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	Diakomodir
IV	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD					
1.	Bantuan Rastrada untuk Bpk. Sugianto dan Ibu	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jl. Kali Ngebel RT 1/RW 1	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	2 KPM	Diakomodir

NO	USULAN KEGIATAN	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Siti Komariyah	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tanjungsari Sukorejo	(KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
2.	Bantuan Terop dan Kursi untuk Rukun Kematian		Jl. Arjuno RT 5/RW 4 Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul	Jumlah terop dan kursi kematian	102 Buah	Bukan tusi, tidak diakomodir

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yaitu :

1. Pendapatan perkapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing SDM meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Sedangkan tema dan arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025-2029 adalah penguatan pondasi transformasi yang salah satunya adalah transformasi sosial yang meliputi pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Dalam hal perlindungan sosial difokuskan pada perlindungan sosial yang adaptif yang ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Adapun intervensi yang dilakukan meliputi :

1. Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek.
2. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan.
4. Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan.
5. Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk perluasan cakupan secara inklusif serta penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun provinsi. Arah kebijakan pembangunan kota Blitar tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan masyarakat melalui Penguatan Ekonomi kreatif, pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah” yang sejalan misi ke 3 RPJMD 2021-2026 yaitu “Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital”. Dinas Sosial Kota Blitar sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di daerah, merupakan OPD teknis yang akan menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan sosial sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Program Penanganan Bencana disinergikan dengan program pusat, provinsi, antar OPD se Kota Blitar bahkan tidak menutup kemungkinan dengan kabupaten/kota lain serta pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat merupakan wujud nyata upaya Dinas Sosial Kota Blitar untuk meningkatkan pelayanan terhadap PPKS. Disamping itu Dinas Sosial juga melaksanakan tugas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran Renja yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota. Berdasarkan misi yang diemban dan Perubahan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 maka tujuan yang ingin dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Blitar adalah “Meningkatnya kesejahteraan PPKS”. Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tahunan. Dalam kondisi ideal penerapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai jangka panjang, waktu penyampaianya jelas, berorientasi pada hasil nyata. Dalam mengemban tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Relaisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	84,39	84,96	86,04	86,44	86,94
2	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	84,39	84,96	86,04	86,44	86,94
3	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indikator Tujuan : Indeks Keparahen Kemiskinan	Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin	Data resmi dari BPS	0,24	0,12	0,24	0,22	0,21
		Persentase PMKS	PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	Jumlah PMKS ----- x 100% Jumlah penduduk	7,41	7,25	6,73	6,23	5,75
		Persentase PPKS	PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	Jumlah PPKS ----- x 100% Jumlah penduduk	7,41	7,25	6,73	6,23	5,75
4	Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Indikator Sasaran : Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin yang telah menerima pelatihan keterampilan dan mulai merintis usaha/bekerja dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang graduasi mandiri (kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial)	Akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan thn n yang mulai merintis usaha/ bekerja + akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri) ----- x 100% Jumlah fakir miskin thn n	-	1,86	2,70	3,00	3,24

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Relaisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
		Persentase penurunan PMKS	PMKS adalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	$\frac{(\text{Jml PMKS thn } n-1) - (\text{Jml PMKS thn } n)}{\text{Jumlah PMKS thn } n-1} \times 100\%$	1,47	1,46	6,49	1,52	1,54
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar bidang sosial kewenangan kota $\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$	- PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 24 kategori (sesuai Permensos RI no 8 th 2012 bukan korban HIV/Aids dan NAPZA) - PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial adalah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial kewenangan Kab/Kota	-	-	93,09	94,00	95,00

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial maka diperlukan rencana yang jelas terstruktur yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Mendukung pencapaian IKU dan Tupoksi
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	Mendukung pencapaian IKU dan Tupoksi
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian IKU dan Tupoksi
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Luar Panti Sosial	
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	
		Persentase PMKS Terlatih	
1.06.05.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, Tematik Kemiskinan
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		Kabupaten/Kota	
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi, SPM atau IKK
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Mendukung pencapaian Tupoksi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial bertolak pada pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang ingin dicapai yang dijabarkan dan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026. Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mengemban misi ketiga Kota Blitar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 yaitu “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital” pada tujuan “Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat” dengan sasaran :

- 1. Menurunnya tingkat ketimpangan antar penduduk miskin.
- 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Kementerian PAN dan RB telah diintegrasikan pohon kinerja Dinas Sosial Kota Blitar pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021-2026. Dalam dokumen dimaksud memuat tujuan yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan PPKS” dengan sasaran “Meningkatnya penanganan PPKS”.

Dalam rangka tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial menyusun dokumen Rencana Kerja tahun 2025 yang menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, lokasi dan pendanaan indikatif berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Blitar 2025, hasil analisis capaian kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan rencana tindak lanjut LKjIP tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023
Pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin	Meningkatkan kapasitas fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan Bansos peralatan usaha	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Menyelenggarakan program Bantuan Sosial bagi fakir miskin yang tepat sasaran	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
		Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Blitar

OPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Blitar						
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				26.091.212.047				25.228.174.220
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		89,00 Indeks	4.863.390.192			89,25 Indeks	4.636.910.920
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	5.933.200			100 %	20.000.000
1.06.01.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dok	3.093.500	DAU		6 Dok	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.01.00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Lap	2.839.700	DAU		12 Laporan	15.000.000
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	3.706.710.248			100 %	3.543.910.920
1.06.01.2.02.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Org/ bln	3.704.342.748	DAU		26 Org/bln	3.541.910.920
1.06.01.2.02.00 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		12 Lap	2.367.500	DAU		12 Laporan	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	141.758.432			100 %	130.000.000
1.06.01.2.05.00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	46.616.000	DAU		2 Paket	40.000.000
1.06.01.2.05.00 10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		26 Orang	95.142.432	DAU		27 Orang	90.000.000
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	285.770.234			100 %	264.500.000
1.06.01.2.06.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		1 Paket	9.990.700	DAU		1 Paket	11.000.000
1.06.01.2.06.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4 Paket	15.758.300	DAU		3 Paket	17.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.06.00 03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		6 Paket	25.453.100	DAU		5 Paket	25.500.000
1.06.01.2.06.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		10 Paket	30.713.600	DAU		10 Paket	29.000.000
1.06.01.2.06.00 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Paket	25.241.000	DAU		1 Paket	25.000.000
1.06.01.2.06.00 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dok	5.400.000	DAU		12 Dokumen	6.500.000
1.06.01.2.06.00 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Lap	163.238.534	DAU		40 Laporan	140.000.000
1.06.01.2.06.00 10	Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2000 Dok	9.975.000	DAU		2000 Dok	10.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	51.847.677			100 %	24.500.000
1.06.01.207.000 5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1 Paket	8.971.800	DAU		1 Unit	12.000.000
1.06.01.207.000 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7 Unit	42.875.877	DAU		1 Unit	12.500.000
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	515.772.324			100 %	515.000.000
1.06.01.2.08.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Lap	87.486.324	DAU		48 Laporan	90.000.000
1.06.01.2.08.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Lap	428.286.000	DAU		13 Laporan	425.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	155.598.077			100 %	130.410.624
1.06.01.2.09.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	78.013.077	DAU		15 Unit	93.889.523
1.06.01.2.09.00 05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		50 Unit	5.000.000	DAU		4 Unit	5.000.000
1.06.01.2.09.00 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara		58 Unit	32.733.000	DAU		40 Unit	28.000.000
1.06.01.2.09.00 09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	29.852.000	DAU		1 Unit	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.01.2.09.00 11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi		1 Unit	10.000.000	DAU		1 Unit	12.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100 %	845.939.600			100 %	689.085.000
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial		100 %	845.939.600			100 %	689.085.000
1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Lembg	845.939.600	DAU		5 Lembaga	689.085.000
1.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		0,88 %	1.040.515.900			0,87 %	1.021.178.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		100 %	1.040.515.900			100 %	1.021.178.300
1.06.04.2.01.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		135 Org	381.500.000	DAU		140 Org	400.000.000
1.06.04.2.01.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Org	11.372.900	DAU		30 Org	12.458.898
1.06.04.2.01.00 03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		14 Orang	20.037.400	DAU		8 Org	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01.00 05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		482 Org	439.921.700	DAU		200 Org	245.000.000
1.06.04.2.01.00 06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		180 Orang	42.601.400	DAU		110 Org	55.000.000
1.06.04.2.01.00 07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		9 Orang	3.475.000	DAU		9 Org	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.04.2.01.00 08	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		35 Orang	35.733.000	DAU		35 Org	83.000.000
1.06.04.2.01.00 09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Orang	53.956.400	DAU		50 Org	58.000.000
1.06.04.2.01.00 10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Orang	5.000.000	DAU		5 Org	7.000.000
1.06.04.2.01.00 12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Org	46.918.100	DAU		73 Org	133.719.402
1.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial		1,42 %	19.089.977.955			1,44 %	21.512.157.761

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih		16,3 %				14,04 %	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval		100 %	19.089.977.955			100 %	18.615.000.000
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial		100 %			100	%	
		Persentase PMKS terlatih		20 %			20	%	
1.06.05.2.02.00 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		100 Keluarga	103.955.900	DAU		100 Kelurga	115.000.000
1.06.05.2.02.00 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		9572 Keluarga	18.538.791.171	DAU, DBHCHT		9514 Keluarga	18.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.05.2.02.00 04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orng	447.230.884	DAU, DBHCHT		80 Orang	500.000.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)		100 %	216.343.400			100 %	226.000.000
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial		100 %	62.491.600			100 %	66.000.000
1.06.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orng	22.499.800	DAU		30 Orang	26.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.06.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orng	39.991.800	DAU		60 Orang	40.000.000
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana		94 %	153.851.800			100 %	160.000.000
1.06.06.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		27 Orng	153.851.800	DAU		27 Orang	160.000.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik		100 %	35.045.000			100 %	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PAGU Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PAGU Indikatif
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara		100 %	35.045.000			100 %	40.000.000
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		979 Makam	35.045.000	DAU		979 Makam	40.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Sosial Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, sebagai penjabaran Renstra Dinas Sosial dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Renja ini disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan kerangka pendanaannya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, Dinas Sosial merencanakan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator/target indikator serta kebutuhan anggaran berpedoman pada Renja Dinas Sosial Tahun 2025.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, pilar-pilar sosial dan seluruh stake holder dalam pelaksanaan Renja ini sehingga akan dicapai hasil kinerja yang optimal.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan tuntutan perkembangan layanan bidang sosial.

Akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2025. Program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2024 diharapkan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang maksimal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya.